



Rancangan RENCANA KERJA BAKORWIL MADIUN TAHUN 2017



**BADAN KOORDINASI WILAYAH
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MADIUN**

JL. PAHLAWAN NO.31 MADIUN

DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum.....	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015.....	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan	18
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	26
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	26
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2017.....	26
III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017.....	26
BAB IV PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tahun 2015	15
Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun.....	19
Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bakorwil Madiun	22
Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017	28

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004, juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan DAN Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jawa Timur, serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja Bakorwil Madiun merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Bakorwil Madiun yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RenjaBakorwil Madiun tahun 2017, akandijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bakorwil Madiun tahun 2017.

Dalam rangka itulah guna meningkatkan peran Bakorwil Madiun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus pada Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun perlu untuk membuat Rencana Kerja yang memuat rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017.

I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Bakorwil Madiun dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
12. Keputusan Kepala Bakorwil Madiun Nomor 41 Tahun 2016 tentang Review Rencana Strategis Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019.

I.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bakorwil Madiun Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Renja menjadi acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun dengan tetap memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
- b. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bakorwil Madiun Tahun 2017.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2017.
- b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakorwil Madiun tahun 2017 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2015, analisis kinerja pelayanan Bakorwil Madiun, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, dan kebutuhan dana atau pembiayaan dalam Renja Bakorwil Madiun tahun 2016.

BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Bakorwil Madiun Tahun 2017.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Prioritas Renstra

Renja Tahun 2017 merupakan tahun ketigapelaksanaan Renstra Tahun 2014-2019 yang di dalamnya memuat sasaran, indikator kinerja, dan target. Pelaksanaan Rencana Kerja Bakorwil Madiun tahun 2015 sampai dengan keadaan bulan Desember 2015 terhadap 6 (enam) program dan 15 kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Belanja langsung yang dianggarkan dalam pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp 6.111.607.526 dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.459.157.242 atau 89,32%.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp.825.206.215 terealisasi sebesar 92,88% atau Rp.766.460.750.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp 1.044.837.117 terealisasi sebesar 87,60% atau Rp 915.263.132.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Kegiatan:
 1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah.
 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Penyusunan database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur, dengan pagu Rp 258.977.748 terealisasi sebesar 88,55% atau Rp 231.914.320.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan;
2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran;
3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan dengan pagu Rp 130.916.666 terealisasi sebesar 88,57% atau Rp 115.950.324.

5. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kegiatan :

1. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

Hasil Pelaksanaan :

- a. Koordinasi Persiapan dan Kesiapan dalam rangka pengiriman Group Pertura (Pertunjukan Rakyat) dan pelaksanaan Pekan KIM Jawa Timur Tahun 2015;
- b. Koordinasi dan pemantauan terkait persiapan dan kesiapan dalam rangka pengiriman Group Pertura dan pelaksanaan Pekan KIM Jawa Timur Tahun 2015;
- c. Rapat Koordinasi Persiapan Pekan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Jawa Timur Tahun 2015 se-Bakorwil Madiun;
- d. Rapat Koordinasi Persiapan Pekan KIM Jawa Timur ke VIII Tahun 2015 se Bakorwil Madiun;
- e. Koordinasi Inventarisasi Data Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah se Bakorwil Madiun;

- f. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penjajakan Kerjasama Selingkar Gunung Lawu Tahun 2015;
- g. Koordinasi dan Pemantauan Perkembangan Politik di Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun Tahun 2015;
- h. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2015;
- i. Koordinasi dan Sharing Informasi Peran dan Tugas Satlinmas;
- j. Koordinasi dan Sharing Informasi Peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- k. Koordinasi dan Pemantauan Perkiraan Areal Sawah Pertanian yang Terdampak Bencana Kekeringan;
- l. Rapat Koordinasi, Konsolidasi serta Kerjasama Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat se Bakorwil Madiun Tahun 2015;
- m. Koordinasi dan Pemantauan pada kegiatan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1436 H/2015M;
- n. Pemantauan dan Pengawasan Non Government Organization(NGO), Lembaga, Orang Asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015;
- o. Rapat Koordinasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2015;
- p. Koordinasi dan Pemantauan Bencana Kekeringan yang berdampak terhadap Krisis Air Bersih di Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun Tahun 2015;
- q. Koordinasi dalam Rangka Antisipasi Potensi Kebakaran Hutan Rakyat di Kabupaten se Bakorwil Madiun Tahun 2015;
- r. Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun;
- s. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Antisipasi Potensi Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2015 di Bakorwil Madiun;
- t. Koordinasi Trantibum Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2016 di Wilayah Bakorwil Madiun;

- u. Koordinasi Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun;
 - v. Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten/Kota meliputi Kabupaten Ngawi, Kota Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan;
 - w. Koordinasi dan Sharing Informasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015;
 - x. Koordinasi model pengembangan kerja sama kewilayahan ke Bagian Pemerintahan/Bagian Kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota BKAD Subosukawonosraten;
 - y. Koordinasi model pengembangan kerja sama kewilayahan ke Bakorwil I Pati dan Bagian Pemerintahan/Bagian Kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota BKAD Ratubangnegoro.
2. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Monitoring dalam rangka Persiapan Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 22 Januari 2015;
 - b. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Lomba Pasar Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2015;
 - c. Koordinasi dan Monitoring Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 12 Februari 2015;
 - d. Koordinasi dan Monitoring Sektor Perikanan dan Kelautan Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2015 s.d 2 Maret 2015;
 - e. Koordinasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Wilayah yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 25 Maret 2015;

- f. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Good Agriculture Practice (GAP) serta Sertifikasi terhadap Produk Hasil Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2015 s.d. 5 Mei 2015;
- g. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 s.d. 29 Mei 2015;
- h. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Good Agriculture Practice (GAP) Serta Sertifikasi Terhadap Produk Hasil Pertanian Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2015;
- i. Koordinasi dan Informasi Pengembangan Sektor Pertanian yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2015 s.d. 28 Mei 2015;
- j. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Kabupaten/Kota terkait ketersediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015 s.d. 29 Juni 2015;
- k. Koordinasi dan Monitoring Persiapan Lomba Pasar Tradisional Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2015 s.d. 18 Agustus 2015;
- l. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Pasar Tradisional se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015;
- m. Koordinasi dan Inventarisasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Festival Makanan Khas Daerah Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 s.d. 14 September 2015;
- n. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Festival Makanan Khas Daerah Tahun 2015 Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015;
- o. Seminar Standarisasi Batu Mulia dan Trend Batu Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2015;

- p. Festival Makanan Khas Daerah Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015;
 - q. Koordinasi dan Monitoring Potensi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015 s.d. 2 November 2015;
 - r. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Koperasi Wanita di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2015 s.d. 27 November 2015.
3. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kemasyarakatan Kegiatan:
- a. Monitoring Persiapan WTS Lokalisasi Kedung Banteng dan Guyangan;
 - b. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin tahun 2014 serta Sosialisasi Program Raskin tahun 2015 Se Bakorwil Madiun;
 - c. Pemantauan Penderita Pasung Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun;
 - d. Koordinasi Realisasi Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2015;
 - e. Rapat Sosialisasi SE Gubernur Jatim tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi Serta Woman Trafficking;
 - f. Koordinasi Pelaksanaan Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas Siswa SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
 - g. Rapat Koordinasi Persiapan Lomba Implementasi Budaya Baca Melalui Uji Cerdas Siswa SLTA Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
 - h. Koordinasi Peran Serta pada Festival Seni Pencak Silat Nusantara I yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 18 Agustus 2015 di 11 Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun;
 - i. Pertemuan Teknis Festival Seni Pencak Silat Nusantara I Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2015;

- j. Koordinasi & Inventarisasi Peran Serta Pada Festival Jaranan Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 18 September 2015;
 - k. Pertemuan Teknis Festival Seni Jaranan Nusantara I Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2015;
 - l. Koordinasi Realisasi Pelaksanaan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan Tahun 2015 se-Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 21 s.d. 30 Desember 201;
 - m. Kegiatan Festival Seni Jaranan Nusantara I yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015.
4. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Inventarisasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Rawan Rusak;
 - b. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Penilaian Program Desa/Kelurahan Berseri Tahun 2015;
 - c. Koordinasi Kegiatan Pertambangan di Wilayah Bakorwil Madiun dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 16 Maret 2015;
 - d. Rapat Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Timur di Bakorwil Madiun yang dilaksanakan tanggal 8 April 2015 di Kantor Bakorwil Madiun;
 - e. Koordinasi dan pemantuan terhadap Pelaksanaan Proyek Jaringan Irigasi yang dibiayai dana APBN / APBD Provinsi Tahun 2015 di wilayah Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 12 ,13, 18 s.d. 21 Mei 2015 di wilayah Bakorwil Madiun pada UPT PSDA di Madiun, UPT PSDA di Malang dan UPT PSDA di Kediri;
 - f. Koordinasi dan Pemantauan Persiapan Infrastruktur Lebaran Tahun 2015, pada tanggal 23 s.d. 29 Juni 2015;
 - g. Rapat Koordinasi dan fasilitasi persiapan evaluasi HIPPA/GHIPPA yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2015 di Ruang Rapat Bakorwil Madiun;

- h. Koordinasi dan Pemantauan Koordinasi dan Pemantauan Persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2015 pada tanggal 1,2,3,6,7,8,9,13 Juli 2015 di Kab/Kota Se Bakorwil Madiun;
- i. Koordinasi dan Pemantauan Persiapan infrastruktur Lebaran Tahun 2015, pada tanggal 23,24,25,26,29 Juni 2015;
- j. Evaluasi dan Pembinaan HIPPA/GHIPPA Tingkat Bakorwil Madiun Tahun 2015 yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 6 Agustus 2015;
- k. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Ijin Pertambangan Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Bakorwil Madiun tahun 2015, pada tanggal 15 September 2015;
- l. Rapat Koordinasi Fasilitasi Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2015 pada tanggal 1 Oktober 2015 di wilayah Bakorwil Madiun;
- m. Koordinasi dan tinjau lapang Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil Madiun pada tanggal 9 s.d. 24 November 2015;
- n. Rapat Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Irigasi Dalam Rangka Persiapan Musim Tanam Tahun 2015 Di Wilayah Bakorwil Madiun Pada tanggal 26 Nopember 2015;
- o. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Program Adiwiyata Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun;
- p. Koordinasi, Inventarisasi dan Monitoring perkembangan Desa/Kelurahan Berseri Tahun 2015.

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan pagu sebesar Rp 3.286.955.494 terealisasi 90,62% atau Rp 2.978.515.995.

6. Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan :

- 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah;

- a. Koordinasi dan Monitoring SIPD Kabupaten/Kota Se Bakorwil Madiun tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2015 sampai 11 Agustus 2015;
 - b. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program SIPD pada Kab/Kota se Bakorwil Madiun pada tanggal 13 Agustus 2015 di Ruang Rapat lantai dua Bakorwil Madiun;
 - c. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan SIPD pada Kabupaten/Kota Se Bakorwil Madiun tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2015 sampai 30 November 2015;
 - d. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD pada Kabupaten/Kota se Bakorwil Madiun Tahun 2015 pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 di Ruang Rapat Lantai 2 Bakorwil Madiun.
2. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur;
 - a. Melakukan update data website resmi Bakorwil Madiun pada portal www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id;
 - b. Meng-update Pusat Data Jawa Timur pada portal: portal.jatimprov.intranet/pusdalip-Bakorwil Madiun;
3. Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
 - a. Koordinasi Peningkatan Peran dan Kapasitas PPID Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 24 Maret 2015;
 - b. Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Peran dan Fungsi PPID pada Kab/Kota se Bakorwil Madiun dan UPT Provinsi Jawa Timur di Kab/Kota Madiun Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Bakorwil Madiun lantai 2;
 - c. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PPID Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 5–16 November 2015;
 - d. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan PPID pada Kabupaten/Kotase-Bakorwil Madiun dan UPT Prov. Jatim di

Kabupaten/Kota Madiun Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2015.

Program Pengembangan Data Informasi dengan pagu Rp 564.714.286 terealisasi 79,87% atau Rp 451.052.721.

Berikut ini adalah Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s/d Tahun 2015

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Tahun 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2015	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan		
					Target (n-2)	Realisasi (n-2)	Tingkat Realisasi (%) (n-2)		Realisasi Capaian (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1											
1	20										
1	20	01									
1	20	01	001	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	80%	-	-	-	-	-
					Persentase pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	93%	-	-	-	-	-
1	20	01	002	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	80%	-	-	-	-	-
1	20	02									
1	20	02	001	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase pemenuhan peralatan	80%	-	-	-	-	-

					dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD								
1	20	02	002	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	80%	-	-	-	-	-	-	-
1	20	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah									
1	20	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100%	-	-	-	-	-	-	-
	20	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60	-	-	-	-	-	-	-
1	20	11		Program Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan									
1	20	11	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4	-	-	-	-	-	-	-
1	20	11	02	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	22	-	-	-	-	-	-	-
1	20	11	03	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update database SKPD	4	-	-	-	-	-	-	-
1	20	96		Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan									
1	20	96	001	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Bidang Pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang	55	-	-	-	-	-	-	-

					ditindaklanjuti									
1	20	96	002	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	55%	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	96	003	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	55%	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	96	004	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	55%	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	97	Program Pengembangan Data Informasi											
1	20	97	001	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	10	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	97	002	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update database SKPD	3	-	-	-	-	-	-	-	
1	20	97	003	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi	3								

11.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur, maka gambaran pelayanan yang telah/akan dilaksanakan adalah :

1. Melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi sinkronisasi dan sinergitas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi kewenangan Otonomi Provinsi, Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah;
2. Mendorong terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan otonomi pemerintahan Kabupaten/Kota di wilayah ;
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah;
4. Memfasilitasi peningkatan program kerjasama dan penyelesaian permasalahan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah perbatasan;
5. Membantu dan memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Instansi vertikal Departemen/Non Departemen di wilayah ;
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Kab./Kota dan koordinator Forpimda di wilayah yang terdiri dari Bakorwil Madiun, Korem 081 Madiun, serta Lanud Iswahyudi Magetan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis Bakorwil Madiun yaitu meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun, maka ditetapkan indikator kinerja serta target pencapaiannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun

No.	Indikator	Rencana Capaian Renstra	Target Renstra Tahun 2014-2019					Realisasi Capaian Renstra hingga Tahun 2015	Catatan Analisis
			2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(14)
1.	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	95%	55%	80%	85%	90%	95%	52.27%	

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Letak geografis kewilayahan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun berada di sebelah paling barat Provinsi Jawa Timur yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga berpotensi terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat terutama pada daerah-daerah perbatasan, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagian besar topografi daerah di wilayah Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun merupakan pegunungan terjal dan tandus sehingga berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

Di samping itu masih terdapat beberapa kawasan yang merupakan daerah rawan bencana, rawan peredaran narkoba dan rawan perkelahian antar perguruan beladiri dan sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun meletakkan isu-isu strategis sebagai prioritas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu (5) lima tahun kedepan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Madiun di Tahun 2014-2019 adalah :

6.1.1.1. Isu strategis pada Bidang Pemerintahan yang meliputi:

- a. Rawan terjadinya bencana alam di daerah terutama banjir, longsor, kekeringan, angin puting beliung;

- b. Masih adanya permasalahan batas wilayah;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah;
 - d. Terjadinya perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisi tahunan hari besar keagamaan (Suran Agung, halal bi halal, dsb);
 - e. Rawan terjadinya permasalahan tentang ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat dan penegakan Perda;
 - f. Belum optimalnya penanganan kerjasama antar daerah baik antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi maupun Luar Provinsi.
- 6.1.1.2. Isu strategis pada Bidang Pembangunan Ekonomi yang meliputi:
- a. Kurangnya penanganan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing;
 - b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian;
 - c. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan;
 - d. Belum optimalnya penanganan permodalan Koperasi dan UMKM;
 - e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah belum optimal;
 - f. Lambat dan kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - g. Terjadinya kerusakan hutan dan rendahnya pendapatan masyarakat sekitar hutan;
 - h. Akses pasar produk industri kecil menengah belum optimal;
 - i. Banyaknya kerusakan dan kurang memadainya infrastruktur pertanian (jaringan irigasi tingkat usaha tani, jalan usaha tani);
 - j. Lemahnya pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan non pangan.
- 6.1.1.3. Isu strategis pada Bidang Kemasyarakatan yang meliputi:
- a. Lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin;
 - b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan terutama angka kematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk dan Pencegahan dari penularan serta pengobatan kasus HIV/AIDS;
 - c. Belum adanya Keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan perempuan;
 - d. Masih tingginya angka pengangguran terbuka yang belum seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan;

- e. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Anjal, gelandangan, WTS, pengemis dan gelandangan psikotik;
 - f. Belum optimalnya penanganan kualitas pendidikan terutama masih adanya siswa putus sekolah (Wajar Dikmen 12 Tahun) dan masih adanya penduduk buta aksara serta perlunya penyetaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;
 - g. Belum optimalnya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN);
 - h. Belum efektifnya program Raskin terutama tepat sasaran (RTSM), tepat kuantitas, tepat administrasi dan tepat pembayaran.
- 6.1.1.4. Isu strategis pada Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi :
- a. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - b. Kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi;
 - c. Kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, DAM dan bendungan;
 - d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pencemaran air dan pengolahan limbah;
 - e. Belum seimbangya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - f. Ketidak serasian RTRW provinsi dan Kabupaten baik dari segi perencanaan dan aplikasinya;
 - g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis.
- 6.1.1.5. Kurangnya penyediaan data dan informasi pendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi :
- a. Belum optimalnya peran Badan Publik dan PPID dalam memberikan layanan informasi publik;
 - b. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang disajikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Peningkatan kualitas SDM penyedia data dan informasi terutama dalam mendorong terwujudnya data sebagai sumber informasi masing-masing daerah;
 - d. Peningkatan SDM aparatur dalam penerapan e-tata naskah.

II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya perubahan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rencana kerja yang akan disusun. Setelah melalui analisis kebutuhan, diperoleh bahwa hasil analisis kebutuhan menunjukkan tidak ada perubahan yang diperlukan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rancangan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2017. Hasilnya disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bakorwil Madiun

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Madiun	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	86%	378.735.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Madiun	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	83%	378.735.000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	86%	378.735.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Madiun	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	83%	378.735.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	86%	1.443.645.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Madiun	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	83%	1.443.645.000
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Madiun	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD	86%	670.110.000	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Madiun	Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana SKPD	83%	670.110.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Madiun	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	86%	773.535.000	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Madiun	Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	86%	773.535.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	100%	509.250.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	83%	509.250.000
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	100%	276.150.000	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Madiun	Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang berlaku	83%	276.150.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60	233.100.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Madiun	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM	60	233.100.000
4.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Madiun	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	86%	161.700.000	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Madiun	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	86%	161.700.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Madiun	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4	64.050.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Madiun	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	4	64.050.000
	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Madiun	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	22	63.000.000	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Madiun	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	22	63.000.000
	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Madiun	Jumlah Update database SKPD	4	34.650.000	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Madiun	Jumlah Update database SKPD	4	34.650.000
5.	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Madiun	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	1.302.000.000	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Madiun	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	85%	1.302.000.000
	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang	85%	483.000.000	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Madiun	Persentase hasil koordinasi bidang pemerintahan yang	85%	483.000.000

	pembangunan bidang pemerintahan		pemerintahan yang ditindaklanjuti			pembangunan bidang pemerintahan		ditindaklanjuti		
	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	85%	273.000.000	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	85%	273.000.000
	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	85%	273.000.000	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang kemasyarakatan	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	85%	273.000.000
	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	85%	273.000.000	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Madiun	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	85%	273.000.000
6.	Program Pengembangan Data Informasi	Madiun	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	61%	231.050.000	Program Pengembangan Data Informasi	Madiun	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	61%	231.050.000
	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	4	136.500.000	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	4	136.500.000
	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	Jumlah update database SKPD	3	28.400.000	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	Jumlah update database SKPD	3	28.400.000
	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Madiun	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi	3	66.150.000	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Madiun	Jumlah sinkronisasi, monitoring dan monitoring pengelolaan informasi dan dokumentasi	3	66.150.000

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bakorwil Madiun pada tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan Kegiatan yang ada di Bakorwil Madiun.

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur

Rencana Kerja Bakorwil Madiun merupakan pelaksanaan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang juga merupakan pelaksanaan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga berpedoman pada RPJMN.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2017

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang hendak dicapai Bakorwil Madiun adalah :

“Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bakorwil Madiun dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Bakorwil Madiun adalah:

“Meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun”

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Dalam Renja Tahun 2017 terdapat program dan kegiatan yang telah disusun beserta tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan dana atau pembiayaan. Adapun beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunannya, antara lain:

1. Pencapaian baik visi dan misi Gubernur Jawa Timur maupun visi dan misi Bakorwil Madiun;
2. Peningkatan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun yang ditindaklanjuti;

3. Peningkatan keterisian data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
4. Peningkatan peran dan fasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) di wilayah kerja Bakorwil Madiun.

Program dan kegiatan prioritas dalam Renja Bakoriwl Madiun Tahun 2017 mendatang didasari pada derivasi harmonisasi Program RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RKPD Tahun 2017 seperti yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel III.1 Prioritas Pembangunan Daerah

	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
1	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Harmonisasi Sosial
2	Program Pengembangan Data Informasi	

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)				
1	URUSAN WAJIB												
1	20		Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	Madiun	86%	378.735.000	APBD PROV		89%	397.675.000		
1	20	01	001	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Madiun	86%	378.735.000	APBD PROV		89%	397.675.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Madiun	86%	1.443.645.000	APBD PROV		89%	1.515.827.000	
1	20	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Persentase pemenuhan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Madiun	86%	670.110.000	APBD PROV		89%	703.615.000
1	20	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		Persentase peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang terpelihara	Madiun	86%	773.535.000	APBD PROV		89%	812.212.000
1	20	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi	Madiun	100%	509.250.000	APBD PROV		100%	534.705.000	
1	20	07	001	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian kelembagaan pemerintah daerah dengan aturan yang	Madiun	100 %	276.150.000	APBD PROV		100 %	289.950.000

					berlaku							
1	20	07	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Madiun	60	233.100.000	APBD PROV		60	244.755.000
1	20	08		Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	Madiun	86%	161.700.000	APBD PROV		89%	169.800.000
1	20	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	Madiun	4	64.050.000	APBD PROV		4	67.250.000
1	20	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun	Madiun	22	63.000.000	APBD PROV		22	66.150.000
1	20	08	003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah Update database SKPD	Madiun	4	34.650.000	APBD PROV		4	36.400.000
1	20	96		Program Koordinasi, Fasilitas dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Madiun	85%	1.302.000.000	APBD PROV		90%	1.367.050.000
1	20	96	001	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Madiun	85%	483.000.000	APBD PROV		90%	507.100.000
1	20	96	002	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pembangunan ekonomi	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan ekonomi yang ditindaklanjuti	Madiun	85%	273.000.000	APBD PROV		90%	286.650.000
1	20	96	003	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kemasyarakatan yang	Madiun	85%	273.000.000	APBD PROV		90%	286.650.000

				kemasyarakatan	ditindaklanjuti							
1	20	96	004	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Madiun	85%	273.000.000	APBD PROV		90%	286.650.000
1	20	97		Program Pengembangan Data Informasi	Prosentase (%) jumlah keterisian data dan informasi	Madiun	61%	231.050.000	APBD PROV		63%	243.653.000
1	20	97	001	Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi data administrasi wilayah	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi data administrasi wilayah	Madiun	4	136.500.000	APBD PROV		4	143.325.000
1	20	97	002	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Jumlah update database penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	Madiun	3	28.400.000	APBD PROV		3	30.870.000
1	20	97	003	Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi PPID	Madiun	3	66.150.000	APBD PROV		3	69.458.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bakorwil Madiun serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Dukungan anggaran yang memadai sangat menunjang pelaksanaan semua program dan kegiatan yang direncanakan sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017.

Demikian Renja Tahun 2017 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Madiun, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Madiun, Juli 2016

KEPALA BAKORWIL MADIUN

DR. GATHOT HENDRO PRIYONO

Pembina Utama Madya
NIP. 19571121 198509 1 001